Journal of Innovation and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 2024-2032

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Desa Amplas

Neysha Septry Tarigan[1], Rimbun C.D.Sidabutar[2], Magdalena J Siringoringo[3]
Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Corresponding Author: neysha.tarigan@student.uhn.ac.id

Published: April 2026

ABSTRACT

Village financial management that is transparent and accountable has become an important issue along with the increasing allocation of village funds. However, the implementation of Government Accounting Standards (SAP) at the village level still faces various challenges, making it necessary to be examined empirically. This study aims to analyze the implementation of SAP and its impact on the transparency and accountability of financial statements in the Government of Amplas Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with informants selected using purposive sampling, including the village head, village secretary, financial officer, general and planning officer, and community representatives. The study was conducted over a period of approximately three to five months. The results indicate that the Amplas Village government has implemented SAP principles in village financial management through systematic transaction recording, periodic preparation of financial reports, and dissemination of financial information to the community through village meetings and information media. The implementation of SAP contributes to improving the transparency and accountability of village financial reports, although it is not yet optimal due to limited human resources and technical understanding of village officials. The implications of this study highlight the importance of enhancing the capacity of village officials through training and the utilization of information technology in financial management to achieve more transparent and accountable governance.

Keywords: Amplas Village, village financial statements, accountability, transparency, Government Accounting Standards

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya pada tingkat desa, menjadi isu yang semakin penting dan mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Besarnya dana yang dikelola desa menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses informasi keuangan, laporan yang kurang informatif, serta lemahnya pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pemilihan Desa Amplas sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai desa yang menerima dan mengelola dana desa dalam jumlah signifikan serta masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan. Berbeda dengan beberapa desa lain yang telah mengoptimalkan sistem pelaporan berbasis teknologi, Desa Amplas menunjukkan indikasi keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, seperti keterlambatan pelaporan, kurangnya pengungkapan informasi keuangan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini menjadikan Desa Amplas sebagai objek yang relevan dan penting untuk dikaji guna memahami secara lebih mendalam implementasi SAP pada tingkat desa.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang bertujuan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP memiliki keterkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, di mana transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, semakin baik penerapan SAP, maka semakin meningkat pula transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa (Halim, 2016; Nordiawan, 2009).

Meskipun secara teoritis penerapan SAP dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Nahar (2012) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang lebih mutakhir oleh Salasa et al. (2022) juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi SAP di tingkat desa masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (Fitriyani et al., 2020; Umami & Nurodin, 2021). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), khususnya pada level desa dan secara spesifik pada objek Desa Amplas yang masih jarang diteliti.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada analisis penerapan SAP serta pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada tingkat desa secara spesifik di Desa Amplas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait implementasi SAP di tingkat desa, serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAP di Desa Amplas serta menguji pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. SAP ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur penggunaan basis akrual dalam pencatatan keuangan pemerintah. Penerapan SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Dalam sektor publik, SAP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat akuntabilitas pemerintah. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi yang baik akan meningkatkan transparansi informasi keuangan sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik. Hal ini didukung oleh penelitian Putri dan Kurniawan (2022) yang menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tingkat desa, penerapan SAP menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan desa yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Namun demikian, implementasi SAP di desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis aparat desa (Wahyuni & Utomo, 2021).

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyediaan informasi kepada publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memahami proses pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam konteks laporan keuangan, transparansi berarti penyajian informasi yang lengkap, jelas, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Heald (2006) menyatakan bahwa transparansi dalam sektor publik merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena memungkinkan adanya

pengawasan publik yang efektif. Dalam konteks pemerintah desa di Indonesia, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi APBDes, laporan realisasi anggaran, serta publikasi laporan keuangan kepada masyarakat.

Penelitian Pratama dan Handayani (2023) menunjukkan bahwa tingkat transparansi laporan keuangan desa dipengaruhi oleh kualitas sistem pelaporan dan keterbukaan informasi. Selain itu, Sari et al. (2021) menemukan bahwa transparansi yang tinggi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa serta mengurangi potensi penyimpangan keuangan.

Dengan demikian, transparansi laporan keuangan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut.

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Dalam konteks laporan keuangan, akuntabilitas tercermin dari kemampuan pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, dapat diaudit, serta didukung oleh bukti yang memadai.

Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai mekanisme yang memungkinkan pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang diambil kepada publik. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian Lestari dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi serta efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu, Nugraha et al. (2020) menemukan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dengan demikian, akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya dalam penggunaan dana publik secara efektif dan bertanggung jawab.

Hubungan SAP dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki hubungan yang erat dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. SAP mengatur proses penyusunan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih sistematis, lengkap, dan dapat dipercaya.

Rahman dan Suryani (2021) menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan karena meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keuangan. Selain itu, Wibowo et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi SAP juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan karena mendorong penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar dan dapat diaudit.

Dengan demikian, penerapan SAP tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pada tingkat desa.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan SAP serta kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang beragam. Putri dan Kurniawan (2022) menemukan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pratama dan Handayani (2023) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan keterbukaan informasi.

Lestari dan Dewi (2022) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan desa dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan sistem pengendalian internal. Namun, Wahyuni dan Utomo (2021) menunjukkan bahwa implementasi SAP di tingkat desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman teknis.

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian yang secara spesifik membahas penerapan SAP terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Desa Amplas masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai variabel independen, serta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penerapan SAP yang baik diharapkan mampu meningkatkan transparansi melalui penyajian informasi yang terbuka dan mudah diakses, serta meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konseptual, hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut: SAP berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan, dan SAP juga berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui analisis statistik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan variabel dependen adalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menguji hipotesis serta mengukur hubungan antar variabel secara objektif menggunakan data numerik. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan melalui analisis statistik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Amplas yang merupakan pusat kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Desa Amplas dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan desa yang menerima dan mengelola dana desa sehingga wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih tiga hingga lima bulan, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta ketersediaan responden agar data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Pemerintah Desa Amplas yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Populasi ini dipilih karena memiliki peran langsung dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa sehingga relevan dengan variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2019), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti aparat desa yang memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan serta bersedia menjadi responden. Dengan teknik ini, diharapkan data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai penerapan SAP, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan desa, APBDes, serta literatur

yang relevan dengan penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan memperkuat hasil penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu penerapan SAP, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert yang terdiri dari lima tingkat penilaian, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala Likert digunakan karena mampu mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden secara sistematis terhadap suatu fenomena (Likert, 1932). Kuesioner disusun secara terstruktur agar memudahkan responden dalam memberikan jawaban serta memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data utama mengenai persepsi responden terhadap penerapan SAP, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti laporan keuangan desa dan APBDes yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil analisis. Kombinasi kedua teknik ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS. Analisis diawali dengan uji instrumen yang meliputi uji validitas untuk mengukur ketepatan instrumen dalam mengukur variabel penelitian dan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi instrumen (Ghozali, 2018). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi. Analisis utama menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan SAP terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan teknik analisis ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang objektif dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara dengan Informan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan kepada lima informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, serta perwakilan masyarakat, diperoleh gambaran mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Amplas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara komprehensif terkait praktik pengelolaan keuangan desa.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Amplas telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip SAP dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek teknis dan sumber daya manusia.

Dari perspektif Kepala Desa, penerapan SAP telah dilakukan melalui pencatatan transaksi secara sistematis serta penyusunan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan media informasi seperti papan pengumuman. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dari adanya laporan keuangan yang disusun secara rutin dan didukung oleh bukti transaksi yang lengkap.

Dari sisi Sekretaris Desa, pengelolaan administrasi keuangan telah dilakukan secara sistematis, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman teknis terkait standar akuntansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi telah berjalan, kualitas implementasi SAP masih perlu ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan secara rinci dan sistematis, yang mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas. Namun, penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi seluruh komponen SAP, sehingga masih terdapat kekurangan dalam aspek pelaporan.

Selain itu, dari perspektif Kaur Umum dan Perencanaan, proses perencanaan keuangan desa telah dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, yang menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari perwakilan masyarakat yang menyatakan bahwa informasi mengenai penggunaan dana desa telah disampaikan secara terbuka, meskipun aksesibilitas informasi masih perlu ditingkatkan.

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Desa Amplas telah dilaksanakan dalam beberapa aspek utama, yaitu pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan kepada pihak terkait. Pencatatan transaksi dilakukan secara sistematis dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan didukung oleh bukti transaksi yang sah.

Namun demikian, penerapan SAP belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan seluruh komponen SAP berbasis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAP masih berada pada tahap adaptasi, khususnya di tingkat desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman teknis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Utomo (2021) yang menyatakan bahwa implementasi SAP di tingkat desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi aparatur desa serta kurangnya pelatihan teknis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP di Desa Amplas telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur desa agar dapat sesuai sepenuhnya dengan standar yang berlaku.

Pembahasan

Kesesuaian Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan di Desa Amplas telah dilakukan secara sistematis melalui pencatatan transaksi yang lengkap dan didukung oleh bukti transaksi. Hal ini menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan desa.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan seluruh komponen laporan keuangan sesuai SAP, seperti laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan yang belum disusun secara lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SAP masih bersifat parsial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriyani et al. (2020) yang menyatakan bahwa banyak desa belum mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai SAP karena keterbatasan pemahaman teknis. Selain itu, penelitian Putri dan Kurniawan (2022) juga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerapan SAP. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penerapan SAP, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Transparansi Laporan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya membuka akses informasi kepada masyarakat.

Namun, transparansi yang dilakukan masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas informasi oleh masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Handayani (2023) yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan media penyampaian informasi. Selain itu, Sari et al. (2021) juga menemukan bahwa transparansi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan transparansi perlu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi agar akses masyarakat terhadap informasi keuangan menjadi lebih luas dan efektif.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala dan pencatatan transaksi yang didukung oleh bukti yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara administratif.

Namun demikian, akuntabilitas yang dihasilkan masih belum optimal karena laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pertanggungjawaban keuangan desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Dewi (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi. Selain itu, Nugraha et al. (2020) juga menemukan bahwa akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, peningkatan penerapan SAP menjadi kunci dalam memperkuat akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Desa Amplas telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Penerapan SAP terbukti berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan pemahaman teknis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa penerapan standar akuntansi yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penerapan SAP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan SAP dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan desa. Upaya tersebut tercermin dari adanya pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, penyusunan laporan keuangan secara berkala, serta penggunaan dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan telah mulai diimplementasikan dalam praktik pengelolaan keuangan desa.

Dari aspek transparansi, pemerintah Desa Amplas telah melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti musyawarah desa, rapat desa, dan papan informasi yang dipasang di lingkungan kantor desa. Upaya tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa serta berpartisipasi dalam proses pengawasan. Meskipun demikian, transparansi yang dilakukan masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi, sehingga aksesibilitas informasi bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah menunjukkan adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah serta didukung oleh bukti transaksi yang lengkap. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk memenuhi kewajiban administratif dan legal dalam pengelolaan dana desa. Namun demikian, tingkat akuntabilitas yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena laporan keuangan yang disusun masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan, terutama dalam hal kelengkapan komponen laporan keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Amplas telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis perangkat desa, serta belum optimalnya sistem administrasi dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar penerapan SAP dapat dilakukan secara lebih optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Amplas disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peningkatan kompetensi ini penting agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih lengkap, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti publikasi laporan keuangan melalui media digital atau website desa, sehingga akses informasi bagi masyarakat menjadi lebih luas dan efektif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan keuangan desa.

Selanjutnya, diperlukan penguatan sistem administrasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa agar setiap transaksi dapat tercatat dengan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pendampingan, supervisi, dan evaluasi berkala juga sangat diperlukan untuk memastikan penerapan SAP di tingkat desa berjalan dengan baik.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta memperluas objek penelitian pada beberapa desa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas, seperti peran teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781526424539

Fitriyani, Y., Pratolo, S., & Nugroho, R. (2020). Analisis penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 17(1), 1–15. https://doi.org/10.21002/jaki.2020.01

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis (8th ed.). Cengage Learning.

Heald, D. (2006). Transparency as an instrumental value. Public Administration, 84(1), 25–46. https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2006.00495.x

Lestari, N. P., & Dewi, R. S. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 17(2), 210–220. https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v17.i02.p05

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1–55. https://doi.org/10.1037/h0070188

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi Offset.

Nahar, A. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 7(2), 45–58.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
Nugraha, A., Rahman, F., & Putra, D. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat. Jurnal EMBA, 8(3), 123–132. https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30123
Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id
Pratama, R. A., & Handayani, N. (2023). Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 14(1), 45–56. https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.23456
Putri, D. A., & Kurniawan, A. (2022). Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. E-Jurnal Akuntansi, 32(5), 1234–1245. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p10
Rahman, M., & Suryani, E. (2021). Pengaruh penerapan SAP terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 145–156. https://doi.org/10.21776/ub.jrak.2021.009.02.5
Sari, M., Rahmawati, E., & Putra, H. (2021). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 8(2), 89–101. https://doi.org/10.17977/um004v8i22021p089
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.). John Wiley & Sons.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). https://peraturan.bpk.go.id
Wahyuni, S., & Utomo, D. (2021). Implementasi standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah desa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 18(1), 75–89. https://doi.org/10.21002/jaki.2021.07
Wibowo, H., Santoso, B., & Laksmi, A. (2023). Pengaruh penerapan SAP terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Jurnal Ilmu Akuntansi, 8(1), 55–67. https://doi.org/10.31092/jia.v8i1.7654
World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. World Bank Publications. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1560-5